

kompasiana
Beyond Blogging

Program ▾ Terpopuler Terbaru Headline Topik Pilihan Komunitas

Sustainability Lyfe Money Vox Pop Travel Story Halo Lokal Sports

LAGI RAME! Mulai Hari Ini, Kategori Kompasiana Akan Disesuaikan

KAMU PASTI SUKA!

**Mengapa Kita Mudah Bosan di Era Hiburan Tanpa Batas?**

**Modifikasi Cuaca itu Doping, Bukan Cara Mengatasi Banjir Jakarta.**

**Panduan Bertamasya untuk Dompet Pasca-Liburan**

**Rika Fitri**
Jurnalis

FOLLOW

Dream Big, Prayer, Work Hard, Stay Focused

Login dengan Google

Gunakan Akun Google Anda untuk login ke **kompasiana.com**

Tidak perlu lagi mengingat sandi. Login menjadi cepat, mudah, dan aman.

Lanjutkan

Email Anda

Daftar

POLITIK & HUKUM

Prof Aarce Tehupeiory : Rekontuksi Hak Kepemilikan Tanah Pasca Bencana Banjir di Sumatera

10 Februari 2026 12:24 | Diperbarui: 10 Februari 2026 12:23 | 31 0 0

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lihat foto



0 0 0 !

Prof Aarce Tehupeiory : Rekontuksi Hak Kepemilikan Tanah Pasca Bencana Banjir di Sumatera



Jakarta - Bencana Banjir yang terjadi pada akhir tahun 2025 di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah-daerah lainnya di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepastian **hukum** hak kepemilikan tanah bukan hanya bencana alam namun bencana sosial hukum.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Pusat Kajian **Hukum** Agraria dan Sumber Daya Alam (PK-HASA), Prof. Dr. Aarce Tehupeiry, S.H., M.H., pada saat webinar nasional "REKONTUKSI HAK KEPEMILIKAN TANAH PASCA BENCANA BANJIR DI SUMATERA", Senin(09/02/2026).

Prof. Aarce berkata bahwa penanganan bencana di Sumatera tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, tetapi harus disertai dengan reforma agraria, penataan ruang yang tegas, penguatan hak masyarakat atas tanah, serta edukasi dan insentif konservasi lingkungan, katanya.

Dengan memperkuat kebijakan dan regulasi khusus terkait penanganan dan rekonstruksi hak kepemilikan tanah pasca bencana banjir di Sumatera, termasuk penyederhanaan prosedur administrasi tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum, ungkap Prof Aarce.

Kita juga harus melakukan pendataan dan pemetaan ulang secara terpadu (Pemetaan Tanda Batas) di wilayah terdampak banjir pasca bencana banjir di Sumatera dengan mengintegrasikan data pertanahan, data kebencanaan, dan data kependudukan. Dengan mempercepat restorasi pelayanan pertanahan,ucap Prof Aarce.

Prof Aarce mengingatkan dengan mendorong digitalisasi arsip dan dokumen pertanahan merupakan langkah mitigasi risiko kehilangan data akibat bencana banjir di masa depan , dan juga tingkatkan kapasitas dan peran pemerintah daerah, aparat desa/ kelurahan, serta tokoh masyarakat pasca banjir di Sumatera dengan melakukan proses verifikasi dan mediasi sengketa kepemilikan tanah.

Secara hukum agraria, hukum adat, hukum lingkungan kita harus mengutamakan dalam kebijakan pertanahan dengan pendekatan partisipatif dan perlindungan pasca banjir kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar rekonstruksi hak tanah berjalan adil dan inklusif.

Mengintegrasikan program rekonstruksi pertanahan pasca banjir

dengan perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana, sehingga pembangunan kembali di wilayah terdampak menjadi lebih aman, berkelanjutan, dan berketahanan terhadap bencana.

Mengutamakan instrumen lingkungan dalam kebijakan pertanahan dengan konsep Amdal dan Izin lingkungan sebagai syarat hak guna usaha, penerapan prinsip Polluter pays, sanksi tegas atas kerusakan lingkungan.

Prof Aarce menegaskan penanganan bencana di Sumantera tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, tetapi harus disertai: Reforma Agraria, Penataan ruang yang tegas, penguatan hak masyarakat atas tanah, edukasi dan insentif konservasi lingkungan.

HALAMAN : 1 2 >

LIHAT SEMUA



Lihat Politik & Hukum Selengkapnya

BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

AKTUAL BERMANFAAT INSPIRATIF MENARIK MENGHIBUR
UNIK

Belum ada penilaian.
Jadilah yang pertama untuk
memberikan penilaian!

BERI KOMENTAR

Tulis Tanggapan Anda...

Berkomentirlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

KIRIM

0 0 0 !

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

TAG

politik-hukum

banjirsumatera bencanaalam

politik

vox pop

hukum

RESPONS : 0



Penghargaan dan Sertifikat:



Untuk pengajuan iklan dan kerja sama bisa
menghubungi: kerjasama@kompasiana.com
Kunjungi Mediakit Kompasiana di sini
Programmatic partnership
programmatic.team@kgmedia.id

TENTANG KOMPASIANA
SYARAT DAN KETENTUAN
FAQ KOMPASIANA
TUTORIAL
PRIVACY & POLICY
BANTUAN

PROGRAM
K-Rewards
Infinite
Kilas Balik
Narativ
The Series
Ramadan

KATEGORI
Terpopuler
Terbaru
Headline
Topik Pilihan
Sustainability
Lyfe
Money
Vox Pop
Travel Story
Halo Lokal

IKUTI KAMI

© 2026 KOMPASIANA.COM. A SUBSIDIARY OF KG MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED

0

0

